



# LKJIP

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Isu-isu Strategis.....	6
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	7
1.4.1 Sumber Daya Manusia .....	7
1.4.2 Sarana-Prasarana .....	9
1.4.3 Anggaran.....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD .....	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 .....	19
3.1.1 Sasaran Strategis ke 1 “ Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” .....	20
3.1.2 Sasaran Strategis ke 2 “ Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah” ...	30
3.2 Realisasi Anggaran.....	31
3.2.1 Belanja Operasi .....	32
3.2.2 Belanja Modal.....	32
BAB 4 BAB IV PENUTUP.....	36
4.1 Simpulan .....	36
4.2 Rekomendasi .....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Gambaran Pegawai BAPENDA Kabupaten Kendal Tahun 2022.....	7
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BAPENDA.....	15
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BAPENDA.....	16
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja.....	17
Tabel 2.4 Program Anggaran dan Target 2022.....	17
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	19
Tabel 3.2. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	19
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Tahun 2022.....	20
Tabel 3.4 Perbandingan target kinerja, capaian kinerja dan persentase capaian tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 Sasaran Strategis ke-1.....	20
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Dengan Renstra Bapenda.....	21
Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-1.....	21
Tabel 3.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	21
Tabel 3.8 Indikator Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	22
Tabel 3.9 Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Baru.....	22
Tabel 3.10 Pajak Daerah yang mengalami pertumbuhan Wajib Pajak Baru tetapi masih dibawah target.....	23
Tabel 3.12 Persentase Pertumbuhan Pajak Pertahun.....	25
Tabel 3.13 Pajak Daerah yang tidak mencapai target Pertumbuhan Pajak.....	26
Tabel 3.14 Tabel Persentase Realisasi Pajak Daerah.....	27
Tabel 3.15 Pajak Daerah yang tidak mencapai target realisasi tahun 2022.....	29
Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Tahun 2022.....	30

Tabel 3.17 Perbandingan target kinerja, capaian kinerja dan persentase capaian tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 Sasaran Strategis ke-2.....	30
Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Dengan Renstra Bapenda .....	30
Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-2 .....	31
Tabel 3.20 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	31
Tabel 3.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi .....	32
Tabel 3.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal.....	32
Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022.....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal .....	3
Gambar 1.2 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	8
Gambar 1.3 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan.....	9
Gambar 1.4 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.....	9
Gambar 2.1 Program dan Anggaran (Perjanjian Kinerja) .....	18
Gambar 3.1 Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi .....	32
Gambar 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal .....	33
Gambar 3.3 Target dan Realisasi Program dan Kegiatan di BAPENDA Kabupaten Kendal .....	35

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

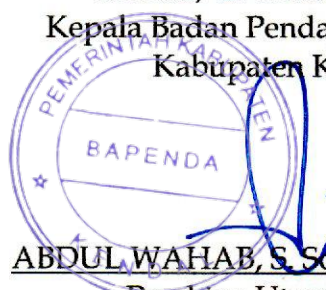
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam RENSTRA BAPENDA.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021 - 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Kendal, 29 Desember 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kendal



ABDUL WAHAB, S. Sos., MIDS., M. Eng  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731021 199703 1 002



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Peraturan Bupati Kendal Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal. Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sedangkan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal adalah :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pendapatan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendapatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendapatan;
- f. Pelaksanaan administrasi badan di bidang pendapatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati di bidang pendapatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja capaian tujuan dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal yang telah memasuki tahun ke dua / terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026. LKJIP juga merupakan perwujudan komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada hasil, baik *output* maupun *outcomes* menuju pemerintahan yang amanah (*good governance*) dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berdasarkan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat menjadi media untuk membangun komitmen bersama guna peningkatan kinerja ke depan yang lebih produktif, efektif dan efisien dari segi perencanaan, pengorganisasian dan manajemen keuangan.

Pada Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah berupaya meningkatkan capaian sasaran strategis yang termuat dalam Renstra dan pencapaian target RPJMD. Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/Penetapan Kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Selanjutnya dilakukan analisa dan tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa yang akan datang.

## 1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses dan Struktur Organisasi

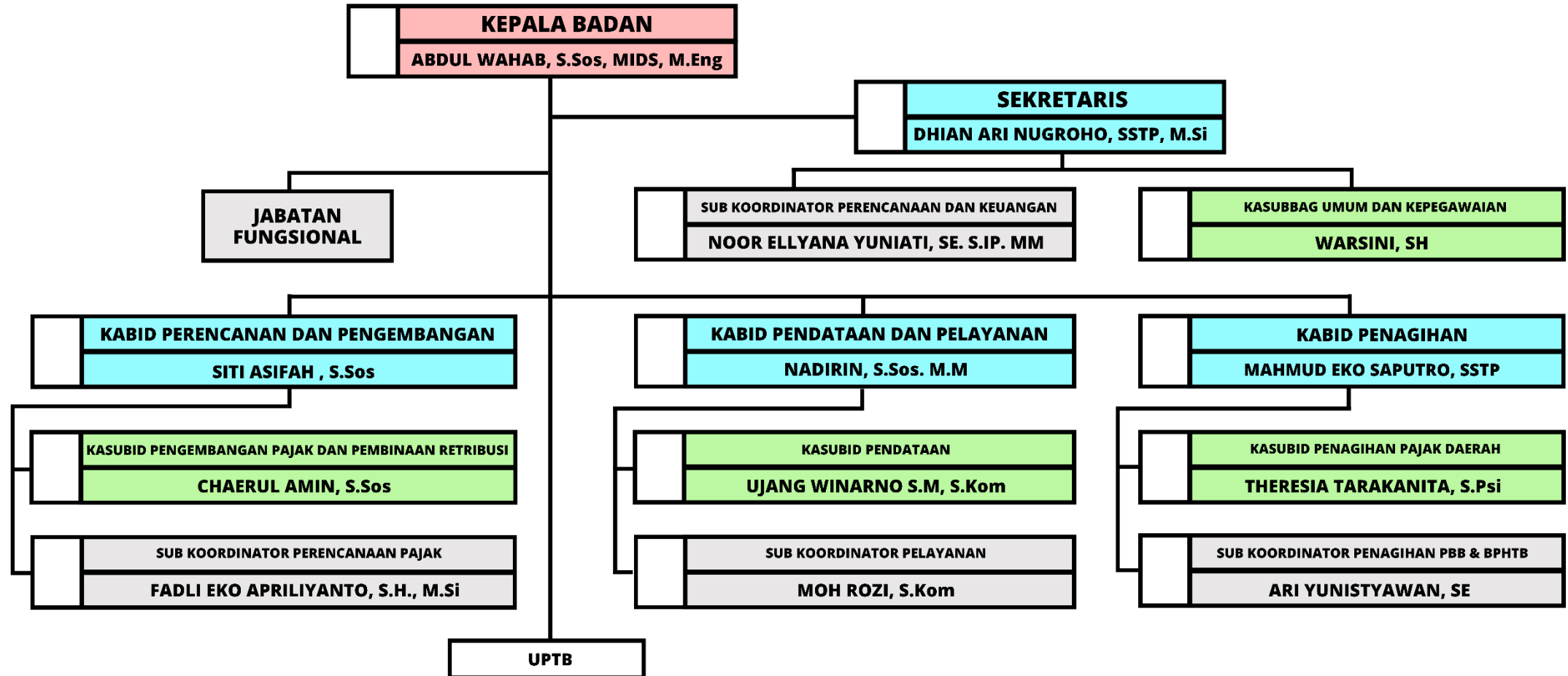
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang membawahkan:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, yang membawahkan:
  - a. Subbidang Pengembangan Pajak dan Pembinaan Retribusi;
  - b. Sub koordinator Perencanaan Pajak
4. Bidang Pendataan dan Pelayanan, yang membawahkan:
  - a. Subbidang Pendataan; dan
  - b. Sub Koordinator Pelayanan.
5. Bidang Penagihan, yang membawahkan:
  - a. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
  - b. Sub Koordinator Penagihan PBB dan BPHTB
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Badan

Adapun untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi sebagaimana berikut :



## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KENDAL



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal

Dalam rangka peningkatan kinerja evaluasi program kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal, menemui permasalahan baik berasal dari dalam ( Internal ). Adapun Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pendapatan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendapatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendapatan;
- f. pelaksanaan administrasi Badan di bidang pendapatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendapatan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan mempunyai Tugas - tugas :

- 1) merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Badan berdasarkan peraturan perundang- undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 4) merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendapatan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 5) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

- 6) menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Badan mencapai target yang telah ditetapkan;
- 7) menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- 8) menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan agar diperoleh hasil yang optimal;
- 9) menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di bidang pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 10) menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 11) menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 12) mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan sistem pertukaran informasi dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 13) menandatangani dan menerbitkan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan;
- 14) memfasilitasi pelayanan pengaduan dibidang pendapatan dan merumuskan upaya pemecahan masalah terhadap pengaduan yang diajukan;
- 15) mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang pendapatan agar diperoleh efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- 16) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- 17) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;

- 18) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 19) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 20) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

### 1.3 Isu-isu Strategis

Memperhatikan gambaran layanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya:

1. Permasalahan Sekretariat
  - a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
  - b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Permasalahan Bidang Perencanaan dan Pengembangan
  - a. Belum optimalnya pertumbuhan wajib pajak baru
  - b. Belum optimalnya penyampaian informasi pajak dan retribusi di masyarakat
3. Permasalahan Bidang Pendataan dan Pelayanan
  - a. Belum optimalnya kualitas data wajib pajak
  - b. Belum optimalnya pelayanan pajak
  - c. Belum optimalnya e-pendapatan dalam pelayanan pajak dan retribusi
4. Permasalahan Bidang Penagihan.
  - a. Belum optimalnya realisasi pajak daerah
  - b. Belum optimalnya pertumbuhan pajak daerah setiap tahunnya
  - c. Masih kurangnya SDM
  - d. Belum optimalnya penagihan PBB

Selain beberapa kendala dan permasalahan tersebut di atas maka terdapat beberapa isu strategis yang menuntut kinerja Badan Pendapatan Daerah lebih meningkat. Adapun isu-isu strategis tersebut diantaranya:

1. Kurang akuratnya data objek pajak;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan obyek pajaknya;
3. Penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang belum optimal;
4. Kurangnya pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

#### 1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

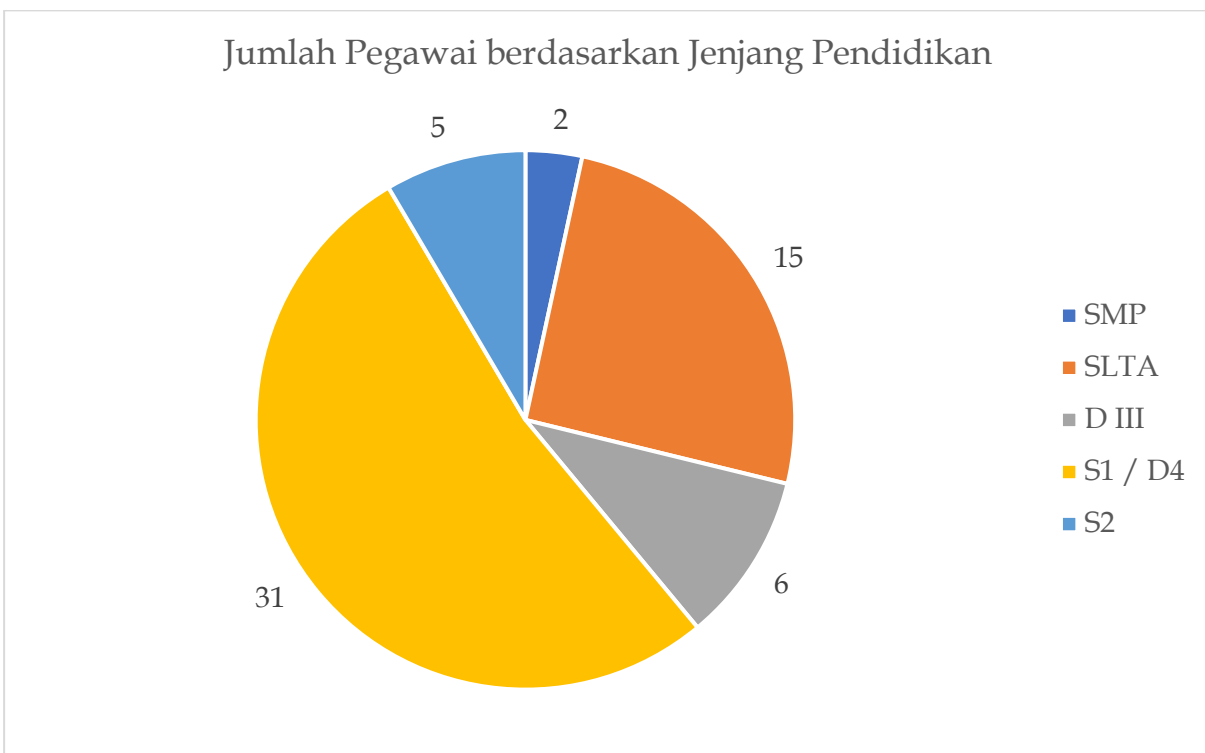
##### 1.4.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah sampai bulan Desember 2022 sebanyak 59 orang yang terdiri dari 39 orang PNS, 14 orang Tenaga Penunjang Kegiatan dan 6 Tenaga Out Sourcing. Adapun kondisi Sumber Daya Manusia selengkapnya adalah sebagai berikut:

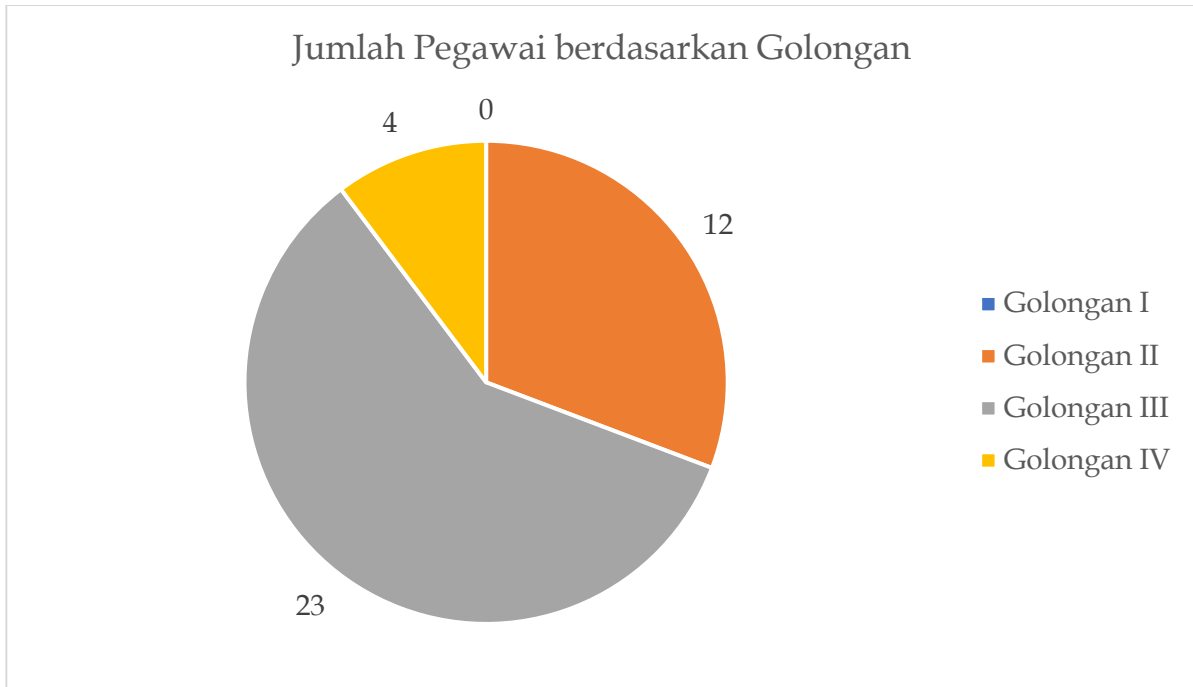
*Tabel 1.1 Gambaran Pegawai BAPENDA Kabupaten Kendal Tahun 2022*

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Berdasarkan pendidikan :		
	- S M P	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS: 1 ;</li> <li>• Tenaga Out Sourcing: 1</li> </ul>
	- S L T A	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS: 9</li> <li>• Tenaga Penunjang Kegiatan: 1</li> <li>• Tenaga Outsourcing: 5</li> </ul>
	- D III	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS: 6</li> </ul>
	- S 1 / D 4	31	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS:18</li> <li>• Tenaga Penunjang Kegiatan: 13</li> </ul>
	- S 2	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS: 5</li> </ul>
	Jumlah	59	
2.	Berdasarkan Pangkat / golongan :		
	- Golongan I	-	
	- Golongan II	12	
	- Golongan III	23	

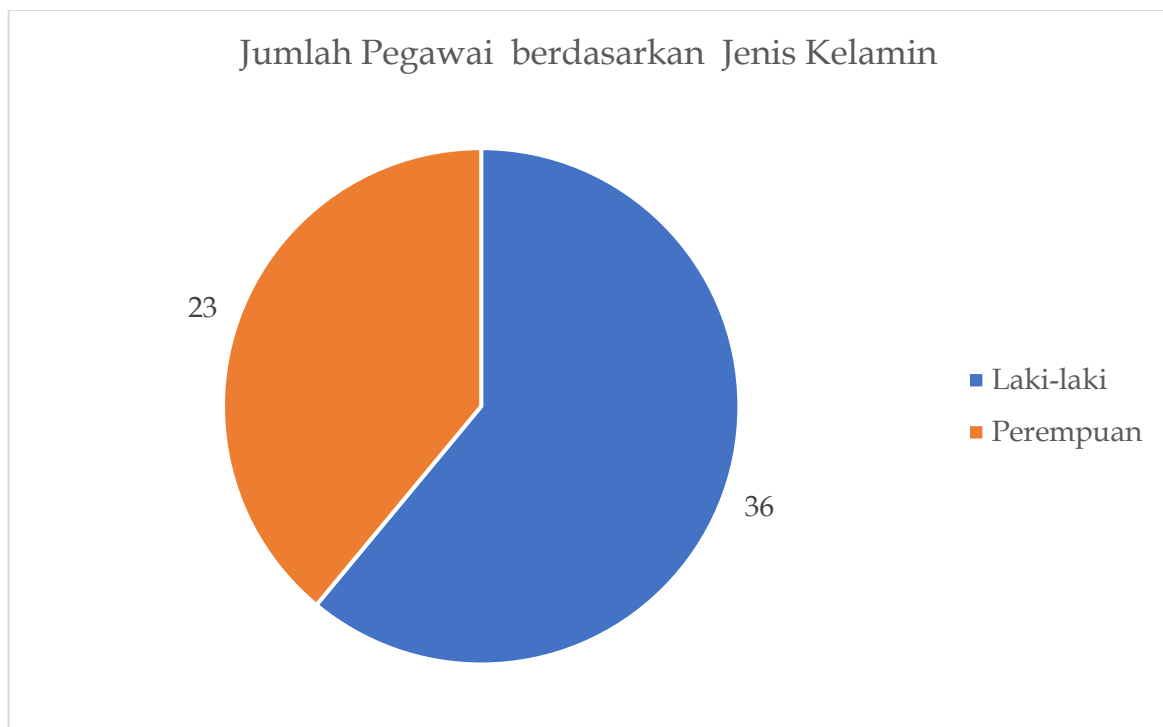
NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
	- Golongan IV	4	
3.	Berdasarkan jenis kelamin		
	a. Laki-laki	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS: 26</li> <li>• Tenaga Penunjang Kegiatan: 4</li> <li>• Tenaga Outsourcing: 6</li> </ul>
	b. Perempuan	23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS: 13</li> <li>• Tenaga Penunjang Kegiatan: 10</li> </ul>



Gambar 1.2 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan



Gambar 1.3 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan



Gambar 1.4 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

#### 1.4.2 Sarana-Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal sebagai berikut:



### 1.4.3 Anggaran

Adapun Anggaran yang dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19,143,619,387
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202,500,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,000,000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152,500,000
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,860,915,423
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,582,105,423
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	278,810,000
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,172,240,887
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103,726,500
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,000,000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98,100,000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,800,000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	615,614,387
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250,000,000
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,822,625,000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	700,365,000
2	Pengadaan Mebel	414,260,000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	708,000,000
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435,735,347
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,300,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180,421,347
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246,014,000
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,549,602,730
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200,000,000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148,275,000

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,201,327,730
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8,018,775,000
I.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	8,018,775,000
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	643,000,000
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1,350,100,000
3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2,242,070,000
4	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100,000,000
5	Penagihan Pajak Daerah	75,000,000
6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	339,786,000
7	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3,268,819,000
	Jumlah	27,162,394,387

### 1.5 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian LKJIP Tahun 2021 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum tentang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJIP Tahun 2022 ini.
- BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal untuk periode 2021-2026 dan Rencana Kinerja untuk tahun 2022.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022.

Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya.

BAB IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 98 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih periode tahun 2021-2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

**"Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan"**

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) Handal, (2) Unggul, (3) Makmur, (4) Berkeadilan. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2021-2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman *stakeholder* terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. **KENDAL HANDAL:** adalah suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai Pusat Industri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdayasaing serta berwawasan lingkungan
2. **UNGGUL:** adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri4.0
3. **MAKMUR:** adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal
4. **BERKEADILAN:** memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*);
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan *stakeholder* pembangunan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.* Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Badan Pendapatan Daerah adalah: *Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik* dengan sasaran: *Meningkatnya birokrasi yang akuntabel.*

Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, Perumusan tujuan strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih adalah:

1. Tujuan  
Meningkatkan kapasitas fiskal daerah
2. Sasaran
  - a. Meningkatnya pendapatan Asli Daerah
  - b. Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah

Untuk dapat melihat lebih rinci mengenai target di masing-masing tujuan, sasaran dengan indikator sasaran setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BAPENDA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kapasitas fiskal daerah	1.1 Meningkatkan pendapatan Asli Daerah	Besaran PAD terhadap keseluruhan pendapatan dalam APBD	19,66	19,93	20,13	20,52	21,10
		1.2 Meningkatkan akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP	82,31	82,32	82,33	82,34	82,35

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan akan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Sementara itu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran menjadi arah kebijakan, karena hal tersebut akan dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan.

Strategi dan kebijakan BAPENDA merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BAPENDA guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan BAPENDA, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran BAPENDA Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendapatan asli daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, peningkatan sistem pengelolaan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas Perangkat Daerah dalam retribusi daerah. peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan:
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder* melalui pemberian kemudahan pelayanan baik kualitas SDM maupun sarana dan prasarannya, peningkatan akuntabilitas pelayanan melalui peningkatan kualitas perencanaan SDM BAPENDA, peningkatan kinerja dan peningkatan disiplin serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil BAPENDA Kabupaten Kendal dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah difokuskan pada Peninjauan tarif dasar pengenaan pajak dan retribusi dengan melakukan penyiapan kajian kenaikan tarif retribusi dan penyiapan kajian kenaikan tarif dasar pengenaan 11 pajak daerah
2. Peningkatan jumlah dan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pendapatan
3. Peningkatan kualitas akuntabilitas difokuskan pada peningkatan kualitas kinerja

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan BAPENDA Kabupaten Kendal dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BAPENDA

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kapasitas fiskal daerah	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas pendapatan asli daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, peningkatan sistem pengelolaan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas Perangkat Daerah dalam retribusi daerah.</li> <li>• Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan</li> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan kepada <i>stakeholder</i> melalui pemberian kemudahan pelayanan baik kualitas SDM maupun sarana dan prasarannya</li> </ul>	<p>1. Peninjauan tarif dasar pengenaan pajak dan retribusi dengan melakukan penyiapan kajian kenaikan tarif retribusi dan penyiapan kajian kenaikan NJOP PBB"</p> <p>2. Peningkatan jumlah dan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pendapatan</p>



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		1.2 Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Peningkatan akuntabilitas pelayanan melalui peningkatan kualitas perencanaan SDM BAPENDA, peningkatan kinerja dan peningkatan disiplin serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Peningkatan kualitas akuntabilitas difokuskan pada peningkatan kualitas kinerja

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

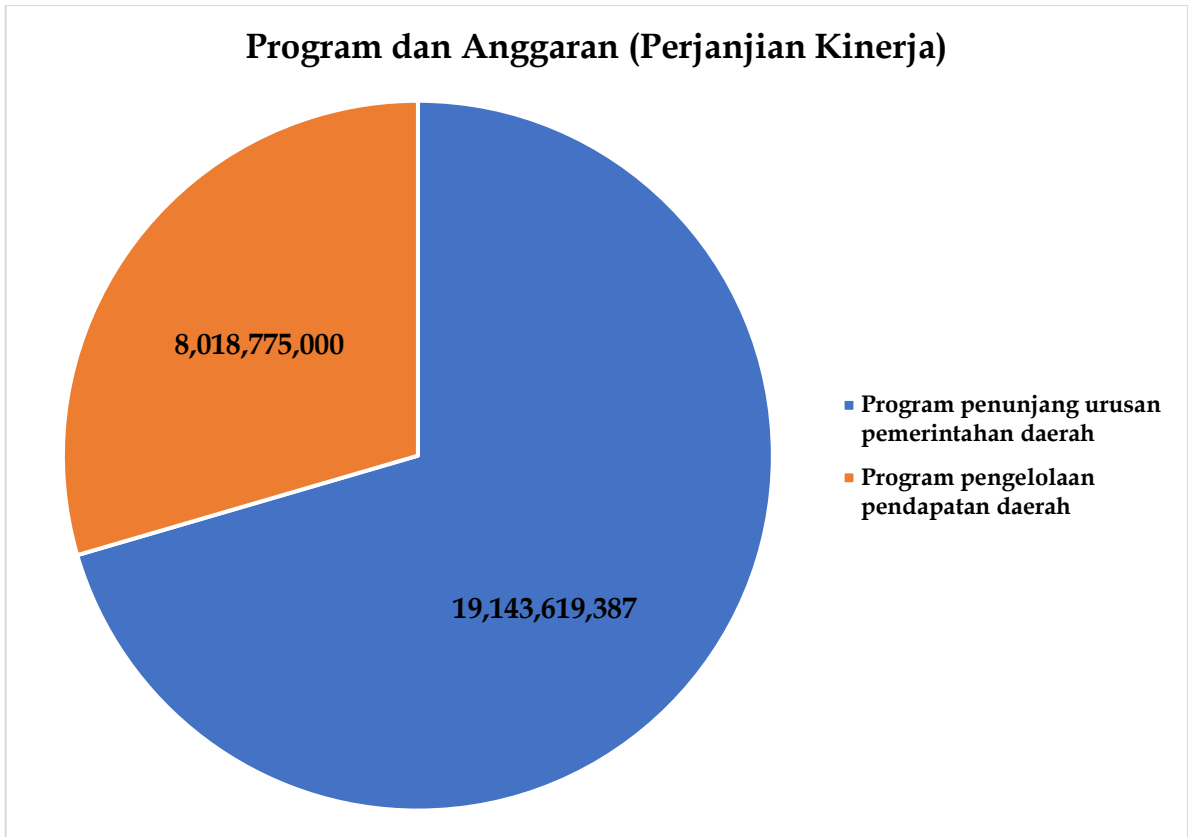
Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Besaran PAD terhadap keseluruhan pendapatan dalam APBD	%	19,66
2	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP		82,31

Tabel 2.4 Program Anggaran dan Target 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	TARGET
I	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	19.143.619.387	100%
II	Program pengelolaan pendapatan daerah	8.018.775.000	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>27.162.394.387</b>	



Gambar 2.1 Program dan Anggaran (Perjanjian Kinerja)

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal ingin dicapai pada tahun 2022 adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah untuk mencapai hal tersebut telah dilakukan beberapa program dan kegiatan dengan hasil capaian sebagai berikut:

*Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022			Target Akhir RPJMD
				REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Besaran PAD terhadap keseluruhan pendapatan dalam APBD	%	19,09	19,66	19,29	98,12%	21,10
2	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP			82,31			

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

*Tabel 3.2. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*

NO	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	> 91%	Sangat Tinggi
2	76 – 90,99%	Tinggi
3	66 – 75,99%	Sedang
4	51 – 65,99%	Rendah
5	< 50 %	Sangat Rendah

Pada tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 terdapat 1 (satu) tujuan yang harus diwujudkan pada tahun 2022, yaitu Meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Untuk mencapai Tujuan tersebut terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan yaitu:

### 3.1.1 Sasaran Strategis ke 1 “ Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

- a. Perbandingan capaian / realisasi kinerja Sasaran Strategis ke-1 tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022, yaitu:

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Besaran PAD terhadap keseluruhan pendapatan dalam APBD	19,66	19,29	98,12%	Sangat Tinggi	E-pajak (Bapenda), BPKAD, OPD terkait Retribusi

- b. Perbandingan antara target kinerja, capaian kinerja dan persentase capaian tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, yaitu:

Tabel 3.4 Perbandingan target kinerja, capaian kinerja dan persentase capaian tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 Sasaran Strategis ke-1

Sasaran	Indikator Kinerja	2020 (*BAKEUDA)			2021 (*BAKEUDA)			2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Besaran PAD terhadap keseluruhan pendapatan dalam APBD		16,74	79,71%		19,09	83%	19,66	19,29	98,12%

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal 2021-2026, yaitu:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Dengan Renstra Bapenda

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Besaran PAD terhadap keseluruhan pendapatan dalam APBD	19,29	21,10	9,38%

- d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah, yaitu:

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-1

Sasaran	Indikator Kinerja	2022			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Besaran PAD terhadap keseluruhan pendapatan dalam APBD	19,66	19,29	98,12%	8,018,775,000	7,339,830,829	91,53%	6,59

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu:

Tabel 3.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Besaran PAD terhadap keseluruhan pendapatan dalam APBD	98,12%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan WP Baru	72,3%	
				Persentase Pertumbuhan Pajak Pertahun	343,9%	

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Persentase Realisasi Pajak daerah	85,81%	

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis ke-1 Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 didukung oleh pencapaian pada program pengelolaan pendapatan daerah dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.8 Indikator Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022
1	Persentase Pertumbuhan WP Baru	4,81%	10%	20,35%
2	Persentase Pertumbuhan Pajak Tahunan	21,62%	10%	34,39%
3	Persentase Realisasi Pajak daerah	93,86%	100%	85,81%

#### 3.1.1.1 Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Baru

Badan Pendapatan Daerah sebagai SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan pendapatan pajak daerah keberhasilannya dapat dilihat dari salah satu indikatornya yakni pertumbuhan wajib pajak baru yang meningkat. Pada Tahun 2022 terdapat 3 pajak daerah berhasil tumbuh lebih dari target 2022 sebesar 10% yakni Pajak Resto tumbuh sebesar 10,61%, Pajak Hiburan tumbuh sebesar 31,82%, Pajak Reklame tumbuh sebesar 17,50%, Pajak MLB tumbuh sebesar 78,57%, Pajak Parkir tumbuh sebesar 50% dan BPHTB tumbuh sebesar 23,50%. Adapun 3 pajak daerah yang mengalami pertumbuhan meskipun belum mencapai target 10% yaitu Pajak Hotel tumbuh sebesar 3,13%, Pajak Air Tanah tumbuh sebesar 6,54% dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) tumbuh sebesar 2,14%. Secara keseluruhan pertumbuhan Wajib Pajak Baru pada tahun 2022 rata-rata sebesar 20,35%.

Tabel 3.9 Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Baru

NO	PAJAK DAERAH	JUMLAH WAJIB PAJAK		PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2021	2022
1	Pajak Hotel	32	33	10.34%	3.13%
2	Pajak Restoran	1781	1970	9.40%	10.61%
3	Pajak Hiburan	66	87	1.54%	31.82%
4	Pajak Reklame	520	611	11.59%	17.50%
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	4	4	33.33%	0.00%

NO	PAJAK DAERAH	JUMLAH WAJIB PAJAK		PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2021	2022
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	14	25	-22.22%	78.57%
7	Pajak Parkir	26	39	0.00%	50.00%
8	Pajak Air Tanah	107	114	-9.32%	6.54%
9	Pajak Sarang Burung Walet	9	9	0.00%	0.00%
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	571193	583390	0.81%	2.14%
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7020	8670	17.43%	23.50%
<b>RATA-RATA PERTUMBUHAN WP</b>				<b>4.81%</b>	<b>20.35%</b>

Keberhasilan menumbuhkan jumlah Wajib Pajak Baru tersebut dapat diraih dengan mengoptimalkan kegiatan berikut:

1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
2. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
3. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.

Upaya inovasi juga dilakukan untuk meningkatkan Pertumbuhan Wajib Pajak Baru Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal telah melakukan beberapa Inovasi diantaranya:

1. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pembayaran pajak daerah dan kebijakan-kebijakan Bupati Kendal terkait pajak daerah.
2. Melaksanakan filtering update data wajib pajak pada SPPT PBB-P2 bagi masyarakat yang akan melakukan balik nama sertifikat hak atas tanah sehingga nantinya dalam penagihan PBB-P2 langsung bisa mengetahui pemilik sertifikat hak atas tanah saat ini dan tidak menemui kendala lagi.

Evaluasi terhadap pajak yang mengalami pertumbuhan Wajib Pajak Baru namun dibawah target adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.10 Pajak Daerah yang mengalami pertumbuhan Wajib Pajak Baru tetapi masih dibawah target*



NO	PAJAK DAERAH	%	EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT 2023
1	Pajak Hotel	3.13%	Jumlah hotel baru belum begitu banyak, namun disisi lain rumah kos yang lebih dari/sama dengan 10 kamar belum terdata secara optimal	Optimalisasi, identifikasi potensi dan pendataan Wajib Pajak baru dengan kerjasama penyedia jasa tenaga pendataan/surveyor
2	Pajak Penerangan Jalan Umum	0.00%	Belum optimal dalam identifikasi potensi dan pendataan Wajib Pajak Baru karena kekurangan SDM	
3	Pajak Air Tanah	6.54%	Belum optimal dalam identifikasi potensi dan pendataan Wajib Pajak Baru karena kekurangan SDM	Optimalisasi, identifikasi potensi dan pendataan Wajib Pajak baru dengan kerjasama penyedia jasa tenaga pendataan/surveyor
4	Pajak Sarang Burung Walet	0.00%	Usaha sarang burung wallet tidak tumbuh dan hanya 1 Wajib Pajak yang masih aktif	Optimalisasi realisasi pajak Wajib Pajak yang masih aktif
5	PBB	2.14%	Keterbatasan SDM dalam memproses SPPT baru hasil pemecahan SPPT	Optimalisasi pelayanan mutasi PBB secara elektronik

### 3.1.1.2 Persentase Pertumbuhan Pajak Pertahun

Badan Pendapatan Daerah sebagai SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan pendapatan pajak daerah keberhasilannya dapat dilihat dari salah satu indikator yaitu pertumbuhan pajak pertahun yang meningkat. Pada Tahun 2022 terdapat 8 pajak daerah berhasil tumbuh lebih dari target 2022 sebesar 10% yakni Pajak Hiburan tumbuh sebesar 81,70%, Pajak Hotel tumbuh sebesar 69%, BPHTB tumbuh sebesar 63,31%, Pajak Parkir tumbuh sebesar 61,74%, Pajak Restoran tumbuh sebesar 59,19%, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tumbuh sebesar 18,79%, Pajak Penerangan Jalan Umum tumbuh sebesar 13,13% dan Pajak Reklame tumbuh sebesar 11,49%. Adapun 2 pajak daerah yang mengalami pertumbuhan meskipun belum mencapai target 10% yaitu Pajak Sarang Burung Walet tumbuh sebesar 9,69% dan Pajak Batuan Mineral bukan Logam tumbuh sebesar 1,15%. Sementara itu Pajak Air Tanah mengalami kemunduran sebesar -1,55%. Secara keseluruhan total pertumbuhan Pajak Pertahun sebesar 34,39%.

Tabel 3.11 Persentase Pertumbuhan Pajak Tahunan

NO	PAJAK	REALISASI PAJAK		PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2021	2022
1	Pajak Hotel	264,626,729	447,209,215	13.55%	69.00%
2	Pajak Restoran	4,770,953,873	7,594,782,390	21.72%	59.19%
3	Pajak Hiburan	221,721,804	402,873,817	7.45%	81.70%
4	Pajak Reklame	2,062,416,400	2,299,394,900	5.31%	11.49%
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	55,363,295,701	62,631,323,546	5.88%	13.13%
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	1,217,848,400	1,231,812,000	73.92%	1.15%
7	Pajak Parkir	104,655,200	169,265,539	0.79%	61.74%
8	Pajak Air Tanah	5,907,518,276	5,816,129,603	13.73%	-1.55%
9	Pajak Sarang Burung Walet	29,787,500	32,675,000	6.15%	9.69%
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	30,746,472,651	36,523,000,089	2.61%	18.79%
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	62,828,821,126	102,606,743,394	57.67%	63.31%
<b>TOTAL</b>		<b>163,518,117,660</b>	<b>219,755,209,493</b>	<b>21.62%</b>	<b>34.39%</b>

Keberhasilan menumbuhkan realisasi pajak daerah tersebut dapat diraih dengan mengoptimalkan kegiatan berikut:

1. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
2. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;

3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan Pajak Pertahun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal telah melakukan beberapa Inovasi diantaranya:

1. Pembentukan kembali Satuan Tugas Penertiban Pajak Daerah yang berasal dari unsur Pemkab Kendal, Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal dan Kejaksaan Negeri Kendal;
2. Pemanggilan kepada Penanggungjawab Pemungut Pajak PBB-P2 yang prosentasenya masih rendah yaitu Kepala Desa dan Lurah yang prosentase pemasukan PBB-P2 diwilayahnya masih rendah.
3. Pemeriksaan Pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi terhadap pajak yang tidak mencapai target pertumbuhan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Pajak Daerah yang tidak mencapai target Pertumbuhan Pajak

NO	PAJAK DAERAH	%	EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT 2023
1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	1.15%	Beberapa penambang tidak aktif dan/atau tidak perpanjang izin usaha pertambangan di tahun 2022	Identifikasi Wajib Pajak Baru dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa
2	Pajak Air Tanah	-1.55%	Penurunan pengambilan air tanah di PDAM sebagai Wajib Pajak penyumbang pajak terbesar tidak tercover dengan penambahan WP Baru	Optimalisasi, identifikasi potensi dan pendataan Wajib Pajak baru dengan kerjasama penyedia jasa tenaga pendataan/surveyor
3	Pajak Sarang Burung Walet	9.69%	Usaha sarang burung walet tidak tumbuh dan hanya 1 Wajib Pajak yang masih aktif	Optimalisasi realisasi pajak Wajib Pajak yang masih aktif

### 3.1.1.3 Persentase Realisasi Pajak daerah

Badan Pendapatan Daerah sebagai SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan pendapatan pajak daerah keberhasilannya dapat dilihat dari salah

satu indikatornya yaitu tingkat capaian realisasi Pajak Daerah . Pada Tahun 2022 keseluruhan realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 219.755.209.493 atau 85,81%. Terdapat 7 pajak daerah yang berhasil melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 100% yakni Pajak Parkir persentase realisasi sebesar 141,05% atau Rp. 169.265.539, Pajak Hotel tercapai sebesar 127,77% atau Rp. 447.209.215, Pajak Restoran sebesar 108,50% atau Rp. 7.594.782.390, Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar 103,52% atau Rp. 62.631.323.546, Pajak Batuan Mineral bukan Logam sebesar 102,65% atau Rp. 1.231.812.000, Pajak Sarang Burung Walet sebesar 102,11% atau Rp. 32.675.000 dan Pajak Hiburan sebesar 100,72% sebesar Rp. 402.873.817. Sementara itu ada 4 pajak daerah yang tidak mencapai target 100% yakni Pajak Air Tanah mencapai realisasi sebesar 96,94% atau Rp. 5.816.129.603, Pajak Reklame sebesar 88,44% atau Rp. 2.299.394.900, BPHTB sebesar 82,88% atau Rp. 102.606.743.394 dan PBB hanya tercapai sebesar 67,51% atau Rp. 36.523.000.089.

Tabel 3.13 Tabel Persentase Realisasi Pajak Daerah

NO	PAJAK DAERAH	2021		2022		
		REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Hotel	264,626,729	105.85%	350,000,000	447,209,215	127.77%
2	Pajak Restoran	4,770,953,873	119.27%	7,000,000,000	7,594,782,390	108.50%
3	Pajak Hiburan	221,721,804	100.78%	400,000,000	402,873,817	100.72%
4	Pajak Reklame	2,062,416,400	103.12%	2,600,000,000	2,299,394,900	88.44%
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	55,363,295,701	105.15%	60,500,000,000	62,631,323,546	103.52%
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	1,217,848,400	135.32%	1,200,000,000	1,231,812,000	102.65%
7	Pajak Parkir	104,655,200	104.66%	120,000,000	169,265,539	141.05%
8	Pajak Air Tanah	5,907,518,276	104.56%	6,000,000,000	5,816,129,603	96.94%
9	Pajak Sarang Burung Walet	29,787,500	114.57%	32,000,000	32,675,000	102.11%
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	30,746,472,651	102.49%	54,100,000,000	36,523,000,089	67.51%

NO	PAJAK DAERAH	2021		2022		
		REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	62,828,821,126	80.11%	123,798,000,000	102,606,743,394	82.88%
<b>TOTAL</b>		<b>163,518,117,660</b>	<b>93.86%</b>	<b>256,100,000,000</b>	<b>219,755,209,493</b>	<b>85.81%</b>

Keberhasilan tersebut dapat diraih dengan mengoptimalkan kegiatan Penagihan Pajak Daerah. Dalam rangka meningkatkan Realisasi Pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal telah melakukan beberapa Inovasi diantaranya:

1. Layanan mobil pajak keliling yang melayani pembayaran semua jenis pajak;  
Layanan mobil pajak keliling merupakan inovasi baru yang akan diterapkan. Kegiatan ini melibatkan Bank Jateng Cabang Kendal dikarenakan mobil layanan tersebut merupakan bantuan dari Bank Jateng Cabang Kendal.
2. Pemberian penghapusan denda administratif terhadap piutang PBB-P2 tahun 2014 sd 2021;  
Dalam rangka mempercepat target pencapaian pendapatan daerah dan mendukung Program Strategis Pemerintah Daerah, maka perlu menghapus Sanksi Administratif berupa Denda yang Timbul dari Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021.
3. Perpanjangan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 Tahun 2022;  
Selain penghapusan denda administratif, Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 ini juga melaksanakan perpanjangan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 Tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan seringnya wajib pajak yang membayar pada akhir tahun dan mengurangi piutang dikarenakan keengganan wajib pajak untuk membayar apabila terkena denda.

Pemberian undian berhadiah bagi wajib pajak PBB yang lunas PBB-P2 mulai tahun 2014 sd 2022 paling lambat tanggal 31 Mei 2022 yang diundi pada bulan Juni 2022.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi.

Pelaksanaan inovasi optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan optimalisasi pemasangan *tapping box* alat pemantau transaksi di beberapa tempat usaha yang dikenakan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak air tanah sejumlah 100 (seratus) alat.

Evaluasi yang dilakukan terhadap pajak daerah yang tidak mencapai target realisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Pajak Daerah yang tidak mencapai target realisasi tahun 2022

NO	PAJAK DAERAH	REALISASI 2022	EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT 2023
1	Pajak Air Tanah	96.94%	Penurunan pengambilan air tanah di PDAM sebagai Wajib Pajak penyumbang pajak terbesar tidak tercover dengan penambahan WP Baru	Optimalisasi, identifikasi potensi dan pendataan Wajib Pajak baru dengan kerjasama penyedia jasa tenaga pendataan/surveyor
2	Pajak Reklame	88.44%	Tidak optimal dalam identifikasi potensi dan pendataan Wajib Pajak Baru karena kekurangan SDM	Optimalisasi, identifikasi potensi dan pendataan Wajib Pajak baru dengan kerjasama penyedia jasa tenaga pendataan/surveyor
3	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	82.88%	Kepatuhan Wajib Pajak melaporkan nilai transaksi secara jujur masih belum optimal	Pemanfaatan kajian ZNT sebagai pembanding nilai transaksi dan penyesuaian NJOP PBB
4	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	67.51%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat WP besar yang bangkrut</li> <li>• Kepatuhan WP cukup rendah di beberapa wilayah</li> <li>• Integritas perangkat desa kurang di beberapa wilayah</li> <li>• Terdapat tanah yang double SPPT dan tidak diketahui pemiliknya di beberapa wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Updating peta blok dan SPPT PBB di beberapa desa</li> <li>• Penilaian individual terhadap objek pajak yang memiliki potensi pendapatan besar</li> </ul>

NO	PAJAK DAERAH	REALISASI 2022	EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT 2023
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat objek pajak potensial belum dinilai ulang PBBnya</li> </ul>	

### 3.1.2 Sasaran Strategis ke 2 “ Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah”

- a. Perbandingan capaian / realisasi kinerja Sasaran Strategis ke-2 tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022, yaitu:

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP	82,31				Inspektorat Daerah Kab. Kendal

- b. Perbandingan antara target kinerja, capaian kinerja dan persentase capaian tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, yaitu:

Tabel 3.16 Perbandingan target kinerja, capaian kinerja dan persentase capaian tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 Sasaran Strategis ke-2

Sasaran	Indikator Kinerja	2020 (*BAKEUDA)			2021 (*BAKEUDA)			2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP		82,29			82,30		82,31		

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal 2021-2026, yaitu:

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Dengan Renstra Bapenda



Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP		82,35	

- d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah, yaitu:

Tabel 3.18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-2

Sasaran	Indikator Kinerja	2022			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP	82,31			19.143.619.387	17.207.903.068	89,89%	

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu:

Tabel 3.19 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal mempunyai Jumlah anggaran belanja yang bersumber APBD Kabupaten Kendal Tahun 2022 sebesar Rp. 27.162.394.387,- (dua puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari alokasi dana telah terserap sebesar Rp. 24.547.733.897,- (Dua puluh empat

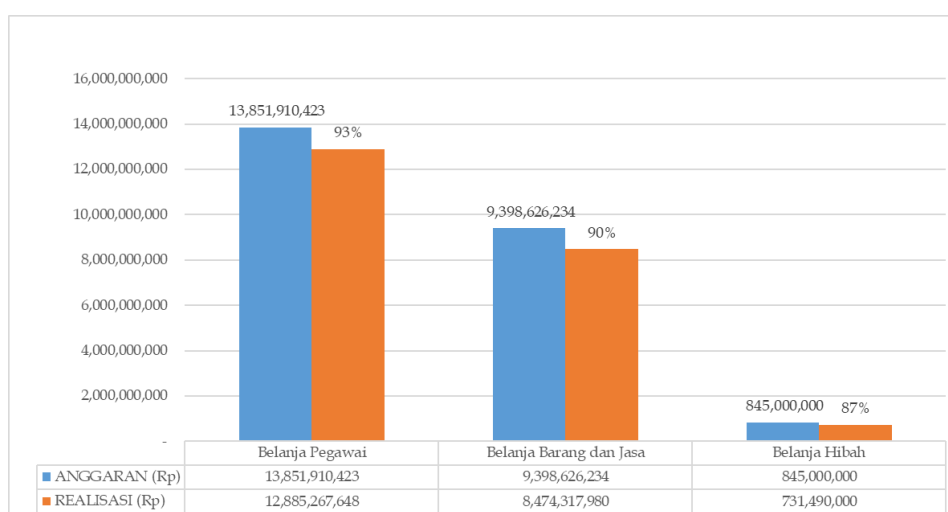
miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) untuk Belanja Operasi alokasikan dana sebesar Rp. 24.095.536.657,- telah terserap sebesar Rp. 22.091.075.628,- atau 92%.

Aspek Keuangan yang merupakan unsur penunjang kegiatan Rutin dan Pembangunan (Belanja Operasi dan Belanja Modal) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### 3.2.1 Belanja Operasi

Tabel 3.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI 2022	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	13.851.910.423	12.885.267.648	93,02
2	Belanja Barang dan Jasa	9.398.626.234	8.474.317.980	90,17
3	Belanja Hibah	845.000.000	731.490.000	86,57
<b>Jumlah</b>		<b>24.095.536.657</b>	<b>22.091.075.628</b>	<b>92%</b>

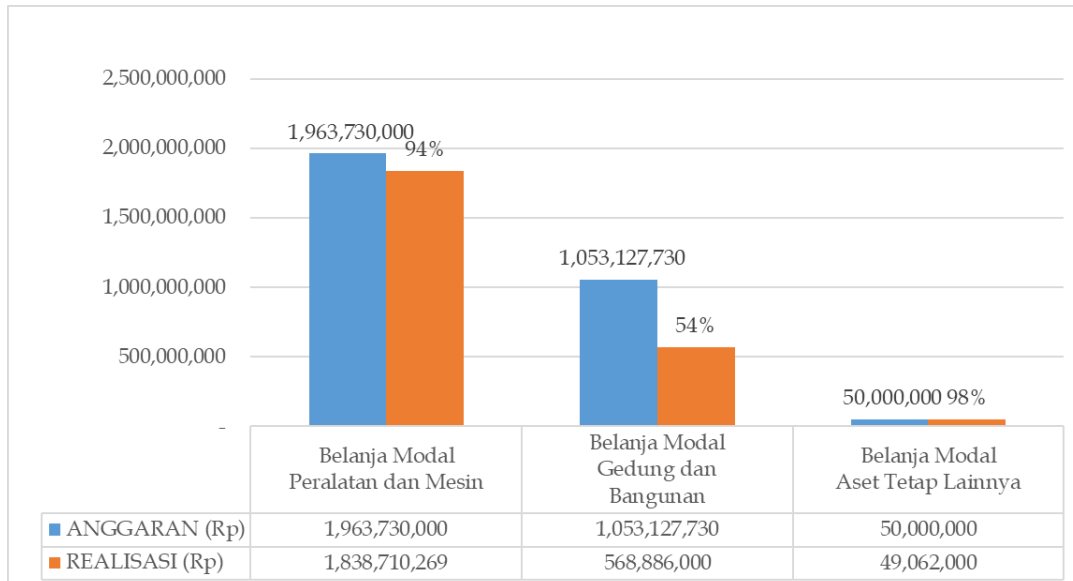


Gambar 3.1 Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

### 3.2.2 Belanja Modal

Tabel 3.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI 2022	
			Rp	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.963.730.000	1.838.710.269	93,63
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.053.127.730	568.886.000	54,02
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	49.062.000	98,12
<b>Jumlah</b>		<b>3.066.857.730</b>	<b>2.456.658.269</b>	<b>80%</b>



Gambar 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

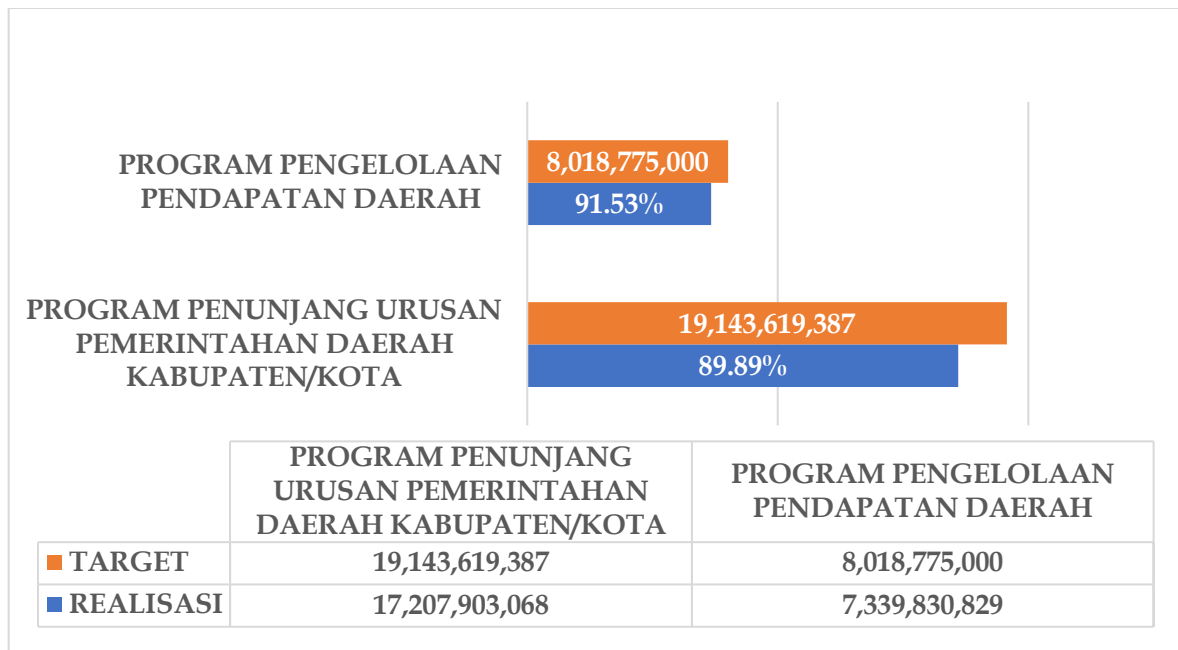
Penyerapan Belanja Modal menunjukkan hasil yang belum optimal. Dari total anggaran Belanja Modal yang tersedia sebesar Rp. 3.066.857.730,- (tiga miliar enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) pada APBD Kabupaten Kendal Tahun 2022 terserap sebesar Rp. 2.456.658.269,- (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 80%. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena selisih nilai kontrak untuk beberapa kegiatan yang berupa pengadaan, terdapat paket yang tidak terlaksana proses pemilihannya dan sebagian kegiatan bersifat penyediaan dana.

Adapun realisasi anggaran Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022

NO	URAIAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% 2022
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19,143,619,387	17,207,903,068	89.89%
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202,500,000	169,444,500	83.68%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000	11,506,500	46.03%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,000,000	19,028,000	76.11%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152,500,000	138,910,000	91.09%
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,860,915,423	12,886,017,648	92.97%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,582,105,423	12,621,087,648	92.92%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	278,810,000	264,930,000	95.02%

NO	URAIAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% 2022
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000	89,350,000	89.35%
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000	89,350,000	89.35%
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,172,240,887	1,022,292,251	87.21%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103,726,500	94,321,850	90.93%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,000,000	66,324,900	66.32%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98,100,000	53,771,450	54.81%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,800,000	4,100,000	85.42%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	615,614,387	601,267,551	97.67%
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250,000,000	202,506,500	81.00%
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,822,625,000	1,714,466,269	94.07%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	700,365,000	648,915,369	92.65%
2	Pengadaan Mebel	414,260,000	392,579,150	94.77%
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	708,000,000	672,971,750	95.05%
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435,735,347	376,522,241	86.41%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,300,000	9,250,000	99.46%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180,421,347	148,694,291	82.42%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246,014,000	218,577,950	88.85%
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,549,602,730	949,810,159	61.29%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200,000,000	146,907,650	73.45%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148,275,000	104,471,250	70.46%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,201,327,730	698,431,259	58.14%
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8,018,775,000	7,339,830,829	91.53%
I.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	8,018,775,000	7,339,830,829	91.53%
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	643,000,000	608,093,400	94.57%
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1,350,100,000	1,247,927,039	92.43%
3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2,242,070,000	2,052,200,775	91.53%
4	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100,000,000	78,318,200	78.32%
5	Penagihan Pajak Daerah	75,000,000	44,550,000	59.40%
6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	339,786,000	231,144,058	68.03%
7	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3,268,819,000	3,077,597,357	94.15%
	Jumlah	27,162,394,387	24,547,733,897	90.37%



Gambar 3.3 Target dan Realisasi Program dan Kegiatan di BAPENDA Kabupaten Kendal

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022 penyerapan anggaran per Sub Kegiatan sangat bervariasi dari yang persentase serapan keuangan tertinggi yaitu di Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan serapan 99,46% dan untuk serapan terendah yaitu di Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar 46,03%.

Secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2022 terdapat efisiensi anggaran dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja operasional sebesar Rp 24.547.733.897 atau 90,37% dibandingkan dengan rencana anggaran sebesar Rp 27.162.394.387. Sehingga Tahun 2022 terdapat efisiensi Rp 2.614.660.490 atau 9,63%.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Simpulan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Peraturan Bupati Kendal Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal. Visi - Misi pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal merupakan pelaksanaan Visi dari Bupati yaitu **“Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”** serta melaksanakan Misi **“Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif”**.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Pencapaian Sasaran Strategis ke 1 “ Meningkatkan pendapatan Asli Daerah “ dengan indikator capaian besaran PAD terhadap keseluruhan pendapatan dalam APBD tercapai 19,29 dari target 19,66 atau persentase capaian sebesar 98,12% atau kategori Sangat Tinggi. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu masing-masing pada tahun 2021 sebesar 19,06 dan tahun 2020 sebesar 16,74.
2. Pencapaian Sasaran Strategis ke 2 “Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah“ dengan indikator Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah capaian pada tahun 2022 sebesar .

#### 4.2 Rekomendasi

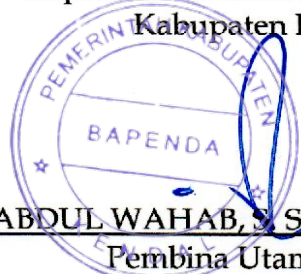
Guna meingkatkan capaian kinerja tahun berikutnya perlu strategi peningkatan pertumbuhan Wajib Pajak dan Pajak antara lain:

1. Penguatan pendataan potensi melalui optimalisasi anggaran pendataan oleh penyedia jasa karena keterbatasan jumlah SDM BAPENDA.

2. Penguatan penagihan dan monitoring realisasi pajak dengan optimalisasi alat pemantauan (*tapping box*), pemasangan *smart camera water meter* sumur air tanah, *cctv* tambang minerba, monil PBB keliling.
3. Pemutakhiran data objek pajak PBB secara masal dan bertahap melalui penyedia jasa pemetaan blok PBB sesuai kemampuan anggaran.
4. Penyesuaian NJOP PBB sebagai dasar pengenaan PBB dan acuan terendah BPHTB secara berkeadilan dan memberikan stimulus yang optimal.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal ini, dengan harapan pelaksanaan program - program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, tertib administrasi dan tertib keuangan.

Kendal, 29 Desember 2022  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kendal



ABDUL WAHAB, S. Sos., MIDS., M.Eng  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731021 199703 1 002